

## **ABSTRAK**

Wilayah kedaulatan Republik Indonesia memiliki daerah perairan yang luas. Selain menyimpan kekayaan hayati yang bisa digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sumber daya alam bahari itu juga mnimbulkan masalah bagi Indonesia, utamanya *illegal fishing* yang menjadi ancaman besar bagi kedaulatan Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Menteri Susi Pudjiastuti menggunakan langkah penenggelaman kapal bagi para pelaku *illegal fishing* agar para pelaku menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap *illegal fishing* bila ditinjau dari kacamata hukum internasional, keabsahan penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah, dan dampaknya bagi hubungan Republik Indonesia dengan negara tetangga yang kapal warganya ditenggelamkan.

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif dengan menggunakan metode pendekatan studi undang-undang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua penegakan hukum yang berbeda yakni jika *illegal fishing* terjadi di wilayah kedaulatan dan Zona Ekonomi Ekslusif dimana yang pertama memberikan hak penuh kepada negara pantai untuk menerapkan hukum nasionalnya sedangkan yang kedua harus melepaskan kapal beserta anak buah kapalnya, penenggelaman sah jika dilakukan di wilayah kedaulatan Indonesia dan tidak sah jika terjadi di Zona Ekonomi Ekslusif, serta penenggelaman itu tidak berdampak apapun terhadap hubungan Indonesia dengan negara lain karena penenggelaman kapal merupakan salah satu bentuk kebijakan Indonesia yang mencerminkan prinsip kedaulatan negara yang mana prinsip ini diakui oleh hukum internasional.

**Keywords:** *Illegal Fishing*, Penenggelaman Kapal, Zona Ekonomi Ekslusif, Hubungan Internasional

## **ABSTRACT**

The sovereign territory of the Republic of Indonesia has a large water area. Besides having biological wealth that can be used to make the people's welfare, marine natural resources also arise an issue for Indonesia, especially *illegal fishing* which is a major threat to the sovereignty of the Republic of Indonesia. Therefore, the Indonesian government under President Joko Widodo through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries chaired by the Minister Susi Pudjiastuti using step sinking for the perpetrators of the *illegal fishing* that the perpetrators be deterrent and not repeat his actions.

This undergraduate thesis aims to find out how the law enforcement against *illegal fishing* viewed from the perspective of international law, the validity of the boat sinking by the government, and the impact on the relations of the Republic of Indonesia with neighboring countries.

This type of research is an explanatory using study approach legislation. The results from this study indicate that there are two different law enforcement that applied if *illegal fishing* occurs in the territorial sovereignty and the Exclusive Economic Zone where the first give full rights to coastal states to implement domestic law while the latter must release the ship and its crew of his ship, boat sinking is legitimate if done in the sovereign territory of Indonesia and invalid if it occurs in the Exclusive Economic Zone, as well as the sinking did not have any impact on the relationship between Indonesia and other countries because of sinking is one of Indonesia's policy which reflects the principle of state sovereignty which this principle is recognized by international law.

**Keywords:** *Illegal Fishing*, Boat Sinking, Exclusive Economic Zone, International Relation